

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Kode Pos. 22742
Telepon. (0634-4345036) Faks. (0634-4345036)
E-mail: naker.tapsel@gmail.com Website: naker.tapselkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Nomor : 100 / KPTS/2023

TENTANG

PERUBAHAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS
KETENAGAKERJAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Barang dalam melaksanakan Program Kegiatan menunjuk Pejabat pada Unit Kerja SKPD selaku PPTK.
 - b. bahwa untuk tertibnya administrasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan di pandang perlu menetapkan Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun Anggaran 2023.
 - c. bahwa pejabat/ pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas dan tanggungjawab sebagai Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam suatu Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat :
1. Undang - Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 -2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 312, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279);

‘

‘

10. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290, tambahan Lembaran Daerah Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 322 dan Tambahan Lembaran Daerah Tahun Nomor 46);
12. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
13. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 659);
14. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 105 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021 Nomor 1080);
15. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Harga Satuan, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 29 Tahun 2023 tanggal 19 Oktober 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1185);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 188.45/716/KPTS/2022 tanggal 13 Desember 2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023.

‘

‘

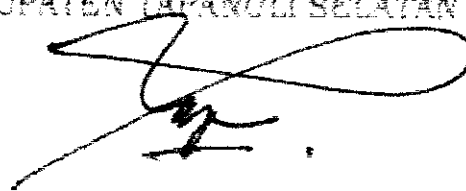
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pada Dinas Ketenagakerjaan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu mempunyai tugas:
1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 3. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas beban pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab Atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMAT : Keputusan ini berlaku dari Bulan Oktober sampai Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sipirok

Pada Tanggal : 23 Oktober 2023

KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAERAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN



Drs. ACHMAD RAJA NASUTION, M.Si

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Tapanuli Selatan sebagai laporan;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Asset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
5. Yang bersangkutan;
6. Peringgal.



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Kabupaten Tapanuli Selatan
Nomor : 610 /KPTS/ 2023
Tanggal : 23 Oktober 2023

NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. R/ANG	JAHATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB
2	3	4	5
SIMULIADU, Salsas 6480610006621001	Pembina (IV/c)	1. Sekretaris 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPK) sesuai kolom 5 (lima)	2.07.01. 2.07.01.2.01. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD
			2.07.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
			2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			2.07.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
			2.07.01.2.03. Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah
			2.07.01.2.03.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
			2.07.01.2.04. Administrasi Umum Perangkat Daerah
			2.07.01.2.04.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			2.07.01.2.04.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			2.07.01.2.04.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			2.07.01.2.04.05 Penyediaan Hutang Cetak dan Penggadaan
			2.07.01.2.04.06 Penyediaan Bahan Baku dan Perawatan Kendaraan Kendaraan
			2.07.01.2.04.09 Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			2.07.01.2.07. Pemerintah Daerah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
			2.07.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas lainnya
			2.07.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			2.07.01.2.08. Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
			2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			2.07.01.2.09. Pemerintah Daerah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
			Pemerintah Daerah 2.07.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			2.07.01.2.09.09 Lainnya

‘

‘

NO	NAMA/ NIT	PANGKAT/ GOL. RUANG	JAHATAN	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB
	2	3	4	5
2	BACHAR, S.Sos 197105021992031006	Pemula TKI (II/c)	1. Kepala Bidang Bina Ketenagakerjaan 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai kolom 5 (lima)	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pekerja Kerja Berdasarkan Klasifikasi Kompetensi Program Peningkatan Tenaga Kerja Pengelolaan Informasi Pasar Pencelenggaraan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Perhubungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI) Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sekor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Kerja Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Program Hubungan Industrial Pengsahhaan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang baru Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendidikan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Penggigit Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Affiliasi Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
3	MUNA SONITA HUTASOTT, STP, M.Si 198604192011012012	Pemula (II/c)	1. Kepala UPT BLK Taperanti Selatan 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai kolom 5 (lima)	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sekor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Kerja Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Program Hubungan Industrial Pengsahhaan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang baru Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendidikan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Penggigit Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Affiliasi Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota
4	RUDY PRIHARDY, SH 197904222005021002	Pemula (IV/a)	1. Kepala Bidang Hubungan Industrial 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai kolom 5 (lima)	Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sekor Swasta Untuk Penyediaan Instruktur Kerja Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja Program Hubungan Industrial Pengsahhaan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang baru Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Pendidikan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Penggigit Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Affiliasi Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

No	Nama/ NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Program/ Kegiatan/Sub
1	2	3	4	5
3	ZULHILMI SURABAR 196602031987031016	Pembina (IV/a)	1. Kepala Bidang Ketransmigrasian 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) sesuai kolom 5 (lima)	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 3.32.02 3.32.02.2.01.
PERUBAHAN JUMROLDIN NABUTION, 2. Sos 196708051992031048		Pembina (IV/a)	1. Kepala Bidang Ketransmigrasian 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PTK) sesuai kolom 5 (lima)	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi 3.32.02 3.32.02.2.01. 3.32.02.2.01.01 3.32.02.2.01.01

KETALA DINAS KETRANSGRAJARAN DAERAH
KAB. PATAS, TAPANULI SELATAN



Drs. Achmad Raja Nabution, M.Si

